

BAB V KESIMPULAN

K. J. Holsti menyampaikan dalam teorinya yang mengubah konteks teori peran untuk dapat digunakan dalam konteks internasional, yang menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dipengaruhi secara langsung oleh bagaimana para pengambil kebijakan di dalam suatu pemerintahan tersebut menentukan peran dari negara atau pemerintahannya, walaupun mungkin juga pada waktu-waktu tertentu kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh status suatu negara di dunia internasional. Status tersebut mungkin juga dapat dipengaruhi oleh peran yang diambil oleh suatu negara, mungkin juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal diluar suatu negara. Peran yang diambil oleh suatu pemerintahan negara tadi dipengaruhi secara langsung oleh kondisi internal negaranya, namun kadang-kadang dapat juga dipengaruhi oleh hal-hal diluar dari negara tersebut. Peran-peran telah diklasifikasikan oleh K. J. Holsti dalam 17 macam peran seperti: *Bastion of revolution-liberator, Regional leader, Regional Protector, Active Independent, Liberation Supporter, Anti-imperialist agent, Defender of the faith, Mediator-Integrator, Regional-subsystem collaborator, Developer, Bridge, Faithfull ally, Independent, Example, Internal Development, Isolate, Protectee.*

Malaysia sebagai negara berdaulat melakukan politik luar negeri yang didasarkan atas tiga faktor utama yaitu berada pada letak yang strategis yaitu di wilayah Asia Tenggara, Malaysia sebagai bangsa perdagangan, juga karena demografinya atau komposisi masyarakatnya yang unik. Politik luar negeri Malaysia didasarkan pada terbentuknya hubungan persahabatan dan kekerabatan yang baik dengan negara-negara yang ada dalam komunitas bangsa-bangsa. Hubungan-hubungan ini dibentuk dengan tetap menghormati urusan dalam negeri negara-negara lain dan menganjurkan kebijakan yang tidak melakukan intervensi dengan menyadari

kedaulatan bangsa-bangsa. Prinsip yang dipegang oleh politik luar negeri Malaysia lebih kepada dengan mengikat perjanjian dan kerjasama, bukan dengan isolasionisme dan aksi sepihak. Kemudian prinsip dasar politik luar negeri Malaysia yaitu persamaan kedaulatan, saling menghormati integritas teritorial, penyelesaian perselisihan dengan cara damai, dan juga menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Tujuan dari politik luar negeri Malaysia adalah untuk melindungi kedaulatan Malaysia dan kepentingan nasionalnya, juga turut berkontribusi berarti terhadap komunitas bangsa-bangsa yang adil dan setara dengan melakukan diplomasi yang efektif. Politik luar negeri Malaysia juga dapat dikatakan bertujuan agar kedaulatannya dan kesejahteraan ekonominya dapat dipertahankan dan terlindungi. Hal ini dapat dicapai dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan mempromosikan perdamaian universal; membina hubungan persahabatan dengan negara-negara asing dan melindungi kepentingan nasional Malaysia didalam level regional maupun internasional. Melalui politik luar negerinya juga, Malaysia berkomitmen untuk melakukan mandat dari dunia internasional dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia.

Malaysia melakukan implementasi dari politik luar negerinya dengan aktif pada level internasional maupun regional(kawasan) tempat Malaysia berada. Salah satu saluran yang digunakan yaitu dengan bergabung kedalam ASEAN. Malaysia adalah salah satu dari lima negara pendiri ASEAN.

ASEAN adalah organisasi antar pemerintah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Meskipun organisasi ini bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang semakin berkembang positif disegala bidang, namun tetap memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya agar hubungan antar anggota dapat berjalan dengan harmonis dan baik. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdapat didalam *ASEAN Charter* atau Piagam ASEAN yang mana piagam tersebut merupakan dasar dari

terbetuknya ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas(kesatuan) teritorial dan identitas nasional dari semua negara-negara anggota ASEAN; berkomitmen bersama dan bertanggung jawab bersama dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional; penolakan terhadap agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lain yang dengan cara apapun tidak konsisten terhadap hukum internasional; berpegang pada penyelesaian perselisihan dengan cara damai; tidak ikut campur tangan kedalam urusan internal sesama negara-negara anggota ASEAN; menghormati hak setiap negara-negara anggota ASEAN untuk memimpin sendiri kehidupannya bebas dari campur tangan, subversi dan kekerasan yang berasal dari luar; ditingkatkannya konsultasi dalam hal-hal serius yang mempengaruhi kepentingan bersama dari ASEAN; taat pada peraturan hukum, tata pemerintahan, dan prinsip-prinsip dari demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional; menghormati kebebasan dasar, memajukan dan melindungi HAM, dan memajukan keadilan sosial; menegakkan Piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humanitarian internasional, yang dianut oleh negara-negara anggota ASEAN; menolak berpartisipasi dalam berbagai kebijakan atau aktivitas, termasuk penggunaan teritorialnya, yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN atau negara non-ASEAN atau subjek non-negara manapun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN; saling menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN sambil menekankan nilai-nilai bersama dengan semangat persatuan dalam keberagaman; sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan keluar, inklusif, dan non-diskriminatif; berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rejim-rejim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi

secara progresif kearah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.

Konflik Rohingya merupakan salah satu dari berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Konflik ini dialami oleh suatu etnis beragama Islam bernama etnis Rohingya yang awalnya bermukim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Krisis ini juga telah menyita perhatian dunia internasional. Etnis Rohingya mengalami tindakan kekerasan berupa pembunuhan, diskriminasi secara terstruktur, kaum-kaum wanita mereka banyak yang diperkosa, hak-hak mereka dirampas, rumah-rumah mereka dibakar. Mereka di musuhi oleh pemerintah Myanmar dan mayoritas masyarakat Myanmar yang beragama Buddha. Karena mendapatkan berbagai perlakuan sadis didaerah tempat tinggalnya, Etnis Rohingya kemudian banyak yang lari keluar dari Myanmar menuju ke wilayah negara-negara tetangga Myanmar.. Dalam perjalanan mereka untuk keluar dari Myanmar dan dalam perjalanan mereka menuju negara-negara tetangga Myanmar, mereka mengalami banyak tantangan seperti dihadang oleh polisi penjaga perbatasan Myanmar, dan banyak juga dari mereka yang meninggal. Mereka melarikan diri ke berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Indonesia dan Bangladesh, namun kebanyakan dari mereka mengungsi di Bangladesh.

Melihat hal ini, selama tahun 2016 hingga tahun 2017 Malaysia sebagai tetangga Myanmar, dan sebagai sesama anggota ASEAN bersama Myanmar, telah melakukan berbagai macam desakan kepada Myanmar untuk menghentikan konflik ini. Malaysia melakukan upaya desakan melalui berbagai macam cara dan saluran seperti melalui ASEAN, Organisasi Kerjasama Islam, memanggil langsung duta besar Myanmar di Malaysia, berani menyampaikan desakan kepada berbagai macam media dan organisasi, dengan melalui demo yang dipimpin oleh pemerintah Malaysia, turut serta mengajak Indonesia untuk ikut mendesak, langsung berhadapan dengan Myanmar untuk mendiskusikan penyelesaian konflik ini,

memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang menderita diakibatkan oleh konflik ini terutama bantuan kepada etnis Rohingya yang mana pemberian bantuan ini sebagai bentuk protes dan desakan Malaysia, Malaysia juga turut membicarakannya bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta menyinggungnya didalam *United Nations General Assembly* pada 24 September 2016.

Desakan-desakan Malaysia kepada Myanmar ini disampaikan karena menginginkan agar Myanmar tetap konsisten memegang beberapa prinsip ASEAN yang sudah disepakati ketika bergabung ke dalam ASEAN. Dalam teori peran yang diubah untuk dipakai pada konteks dunia internasional oleh K. J. Holsti, desakan-desakan Malaysia tersebut termasuk ke dalam *Foreign Policy National Role Conceptions*. *Foreign Policy National Role Conceptions* tersebut dilakukan karena Malaysia mengambil peran sebagai *Defender of The Faith*, hal tersebut dibuktikan dengan usaha Malaysia untuk tetap menjaga prinsip-prinsip ASEAN yang sudah disepakati bersama dengan anggota ASEAN lainnya seperti Myanmar. Sumber dari pengambilan peran *Defender of The Faith* oleh Malaysia berasal dari adalah *ASEAN Charter*, yang mana sumber tersebut berasal dari luar Malaysia.

Prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Malaysia yaitu: komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif untuk meningkatkan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan regional, penolakan penggunaan agresi (serangan) dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain yang dengan cara apapun bertentangan dengan hukum internasional, menghormati kebebasan fundamental, mendorong dan melindungi hak-hak asasi manusia, dan mendorong keadilan sosial, dan mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara damai. Kesemua prinsip-prinsip yang diperjuangkan Malaysia ini terdapat jelas didalam *ASEAN Charter* dan ditujukan kepada Pemerintah Myanmar.